

Analisis bezitter atas menguasai tanah yang dianggap perbuatan melawan hukum menurut kitab undang-undang hukum perdata: Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Tjk = Bezitter's analysis of controlling land is considered an act against the law according to the Civil Code: Analysis of the Decision of the Tanjungkarang District Court Number 64/Pdt.G.2019/PN.Tjk

Rangga Adhitya Yogiswara, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920540119&lokasi=lokal>

Abstrak

Perbuatan melawan hukum dalam perkara No.64/Pdt.G/2019/PN.Tjk ini telah memenuhi perbuatan melawan hukum yang dimana diatur dalam unsur unsur melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata. Walaupun bezitter menguasai dalam tenggat waktu (Daluwarsa) yaitu lebih dari 30 tahun tetapi bezitter tidak mempunyai itikad baik pada pasal 1963 KUH Perdata untuk memberikan dan mengosongkan obyek sengketa, yang dimana pihak penggugat secara sah mempunyai kepemilikan hak atas tanah tersebut yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimana sumbernya berasal dari perpustakaan. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang diantaranya yaitu bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah yang telah mencapai daluwarsa menurut ketentuan KUHPerdata, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bezitter yang tidak beritikad baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum didalamnya unsur-unsurnya yaitu pada pasal 1365 KUH Perdata dan juga melanggar Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan menggunakan tanah tanpa izin atau kuasa yang sah.

.....The unlawful act in case No.64/Pdt.G/2019/PN.Tjk has fulfilled the unlawful act which is regulated in the elements of unlawfulness in article 1365 of the Civil Code. Even though the bezitter within the deadline (expired), namely more than 30 years, the bezitter does not have the good faith in Article 1963 of the Civil Code to give and empty the object of dispute, in which the plaintiff legally has ownership of the land rights that were submitted to the Tanjungkarang District Court. The method used in this research is normative juridical and the data used in this research is secondary data which comes from the library. This research has two formulations of the problem which include What are the legal provisions governing acts against the law on the possession of a plot of land that has reached expiration according to the provisions of the Civil Code, and then How is the legal protection against bezitters who do not have good intentions. The conclusion of this study is that the defendants have committed unlawful acts in its elements, namely in Article 1365 of the Civil Code and also violated Law Number 51 of 1960 concerning the prohibition of using land without the rightful permission or legal proxy.